

DINAMIKA KONFLIK DAN IDENTITAS HIBRIDA DALAM FILM CAHAYA DARI TIMUR: BETA MALUKU KARYA ANGGA DWIMAS SASONGKO MELALUI PENDEKATAN POSKOLONIALISME

Zen Wisa Sartre¹, Mochamad Aviandy^{2*}

¹Departemen Susastra, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia

²Departemen Susastra, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia

Email : zen.wisa@ui.ac.id, aviandy@ui.ac.id

*Korespondensi : aviandy@ui.ac.id

(Submission 24-04-2024, Revisions 25-05-2024, Accepted 03-06-2024)

Abstract

This study examines the dynamics of conflict and hybrid identity in the film Cahaya dari Timur: Beta Maluku (2014) by Angga Dwimas Sasongko. The conflict arises from two elements, namely religion and identity. The method used is textual analysis with a postcolonial approach. The results and conclusions are that the conflict between Islam and Christianity is related to the integration of Maluku and Indonesia and the colonial legacy that has created unequal power relations. Furthermore, to resolve the conflict, the Indonesian government deployed the military, but the result was tension in society. The character Sani Tawainella in this film is present as an agent and can resolve conflicts. He uses football as an instrument for conflict resolution, and creates a hybrid identity.

Keywords: conflict, postcolonial, religion, identity, hybrid, agency

Abstrak

Penelitian ini membahas dinamika konflik dan identitas hibrida dalam film *Cahaya dari Timur: Beta Maluku* (2014) karya Angga Dwimas Sasongko. Konflik bersumber pada dua elemen, yaitu agama dan identitas. Metode yang digunakan adalah analisis teks dengan pendekatan poskolonialisme. Hasil dan simpulan adalah konflik antara agama Islam dan Kristen berkaitan dengan penggabungan Maluku dan Indonesia dan warisan kolonial yang telah menciptakan ketidaksetaraan relasi kuasa. Selanjutnya, untuk menyelesaikan konflik tersebut, pemerintah Indonesia mengerahkan militer, tetapi hasilnya adalah ketegangan di masyarakat. Tokoh Sani Tawainella di dalam film ini, hadir sebagai agensi dan dapat menyelesaikan konflik. Ia menggunakan sepak bola sebagai instrumen penyelesaian konflik, dan menciptakan identitas hibrida.

Kata Kunci: konflik, poskolonial, agama, identitas, hibrida, agensi.

PENDAHULUAN

Di tahun 1999, terjadi konflik pertikaian agama antara Kristen dan Islam di Provinsi Maluku, Indonesia. Konflik ini adalah dampak dari konsekuensi kebijakan Orde Baru, yaitu islamisasi di tahun 1990-an (Bertrand, 2009). Kedatangan pendatang pemeluk agama Islam secara serempak menyebabkan adanya stimulus konflik pada aspek keseimbangan agama dan identitas di Maluku. Bertrand (2009) mengungkapkan bahwa pemeluk agama Kristen merasa kedatangan umat muslim akan menyebabkan mereka menjadi kaum yang termarginalkan, sebab umat Kristen awalnya adalah kelompok yang mendominasi.

Perasaan takut itu datang dari ketidakpastian masa depan politik Indonesia di kala B.J. Habibie mulai melakukan demokratisasi pemerintahan Orde Baru. Lebih dari itu, seiring dengan

berkembangnya umat muslim sebagai mayoritas di Maluku, ketegangan antarkelompok agama menjadi aspek fundamental dalam dinamika konflik di Maluku (Bertrand, 2004). Bila dilihat secara historisitas, kebijakan pemerintah yang menggunakan agama sebagai alat politik sudah dimulai semenjak era pemerintah Hindia Belanda. Pada era kolonial, pemerintah Hindia Belanda melakukan politisasi agama dengan tujuan untuk melanggengkan kekuasaan dan menyebarkan agama Kristen (Qurtuby, 2018).

Atas dasar hal tersebut, pemerintah Hindia Belanda lebih cenderung menyukai masyarakat pemeluk agama Kristen yang menyebabkan para pemeluk agama Islam termarginalisasi (Chauvel, 2009). Marginalisasi ini disebabkan oleh pemberian ruang dan akses untuk berkembang kepada masyarakat Kristen, seperti pekerjaan dan pendidikan. Keadaan ini juga yang mengakibatkan masyarakat Maluku mulai berpindah agama ke Kristen. Terlebih ketika Maluku menjadi kota penting dalam pemerintah Hindia Belanda yang membuat pekerjaan dan akses terhadap pendidikan hanya terbuka bagi penganut agama Kristen.

Di saat Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan di tahun 1945, banyak masyarakat Kristen di Maluku yang melakukan penolakan karena mereka takut akan diikutsertakan dalam negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam (Chauvel, 2009). Setelah Perjanjian Linggarjati di tahun 1949, Indonesia mengadopsi bentuk negara kesatuan dan membubarkan federasi yang sebelumnya dibentuk oleh Belanda. Dengan dukungan sebagian masyarakat Maluku, sejumlah perwira mantan angkatan bersenjata Hindia Belanda yang tidak puas dengan Indonesia menyatakan kemerdekaan Republik Maluku Selatan (RMS). Menanggapi tindakan tersebut, pemerintah Indonesia mengirimkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk meredam perlawanan.

Sebagai dampak dari pemberontakan RMS, posisi masyarakat Maluku menjadi ambigu. Maluku dilabeli sebagai wilayah pemberontak dan dimarginalisasi dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang mengubah rute perdagangan yang awalnya di timur, menjadi di Pulau Jawa sebagai pusatnya (Bertrand, 2009). Kebijakan ini menyebabkan pergerakan ekonomi di Maluku menurun dengan signifikan. Pemerintah Indonesia juga lebih cenderung mendukung pembangunan di daerah padat penduduk, seperti Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, yang menyebabkan ekonomi di Maluku mengalami penurunan.

Keadaan disintegrasi serta konflik antaragama dan identitas yang berakar dari masa Hindia Belanda di Maluku ini direpresentasikan dalam film *Cahaya dari Timur: Beta Maluku* (2014) karya Angga Dwimas Sasongko. Dalam film ini, diceritakan konflik di Maluku dengan agama dan identitas sebagai sumbernya. Tokoh utama dalam film ini, yaitu Sani Tawainella, menggunakan sepak bola sebagai instrumen memengaruhi anak-anak agar tidak ikut serta dalam konflik agama dan identitas.

Berkaitan dengan negara yang memiliki kesejarahan dengan kolonialisme, Frantz Fanon (1963:35) menjelaskannya secara metafor, bahwa dunia telah dibagi dua yang didiami oleh dua spesies yang berbeda –merujuk pada perpecahan yang mendalam dalam masyarakat kolonial antara penduduk asli dan penjajah kolonial. Ini adalah cara untuk menggambarkan polarisasi dan ketidaksetaraan yang melanda hubungan antara kelompok yang berkuasa dan yang dikuasai dalam konteks kolonialisme. Sumber utama atas kolonialisme ini adalah realitas ekonomi yang tidak setara. Sebagai akibatnya, menurut Fanon (1963:36) adalah adanya konsekuensi atas ketidaksetaraan ekonomi kolonialisme.

Maka dari itu, dalam kolonialisme, struktur ekonomi tidak hanya memainkan peran sebagai dasar ekonomi, tetapi juga sebagai struktur yang membentuk keseluruhan masyarakat. Itulah mengapa, ekonomi dan perilaku rasial tidak dapat dipisahkan; keduanya saling terkait dan memperkuat satu sama lain. Dengan kata lain, kolonialisme menciptakan ketidaksetaraan ekonomi dan konstruksi sosial rasial dengan warna kulit dan status ekonomi berperan sebagai elemen-elemen yang saling terkait dan mendefinisikan realitas manusia dalam dimensi koloni.

Dalam masyarakat kolonial, Fanon (1963:148) juga melihat bahwa pandangan kolonial terhadap masyarakat pribumi mencakup pernyataan bahwa masyarakat tersebut tidak memiliki nilai dan moral. Pandangan kolonial ini menyebabkan adanya dehumanisasi yang dilakukan oleh pihak yang lebih dominan (Fanon, 1963:148). Persoalannya, ketika bangsa kolonial pergi dari daerah jajahan, timbul masalah baru selain dehumanisasi, yaitu masyarakat kelas menengah yang naik kelas dan mulai mengambil alih kekuasaan.

Pada kondisi yang rentan ini, menurut Fanon (1963:67), agama memiliki peran yang penting dalam pembangunan kesadaran bernegara. Dalam konteks ini, Fanon (1967:67) mengamati bahwa

agama kerap digunakan oleh pemerintah kolonial sebagai alat untuk mempertahankan dominasi mereka. Akan tetapi, ketika kekosongan di pemerintahan terjadi, ada peluang bagi kelompok menengah untuk kembali menggunakan agama demi mencapai kekuasaan yang baru (Fanon, 1967: 96).

Hal ini dapat terjadi karena menurut Fanon (1963:96), kelas menengah masih memiliki kekurangan intelektual, kemiskinan spiritual, dan pengadopsian pola pikir yang menyebabkan masyarakat kelas bawah mengalami marginalisasi oleh bangsanya sendiri. Oleh karena itu, dalam konteks negara yang baru dan sedang berkembang, kelas menengah kerap menganggap pemerintahan negara harus dikelola dengan kediktatoran (Fanon, 1963:96).

Sebagai dampaknya, partai politik yang seharusnya dapat memfasilitasi aspirasi masyarakat malah menjadi instrumen kekuasaan yang mengontrol masyarakat kalangan bawah. Dengan kata lain, kelas menengah nasional yang kurang berkembang ini sering kali mengambil pendekatan otoriter dalam memerintah dan partai politiknya berperan sebagai pengawas massa untuk menjaga ketaatan dan kedisiplinan. Cara berkuasa ini, menekankan kontrol pemerintah daripada partisipasi aktif dan demokratis dari masyarakat dalam proses pemerintahan, termasuk penggunaan aparat bersenjata untuk mengawasi masyarakat.

Dalam konteks identitas poskolonial, Sen (2013) dan Bhabha (2012) mengungkapkan bahwa identitas merupakan hasil adaptasi masyarakat atas fenomena yang terjadi di sekitarnya. Adaptasi ini melingkupi pencampuran dan penyatuan unsur-unsur budaya yang dapat mengonstruksi identitas di masyarakat (Sen, 2013: 2; Bhabha, 2012: 37). Akan tetapi, menurut Sen (2013:2) identitas tidak hanya menjadi elemen solidaritas dan persatuan, namun dapat pula memantik konflik dan kekerasan antar kelompok. Identitas yang eksklusif ini dapat muncul apabila masyarakat tidak terbiasa dengan keberagaman (Sen, 2013:2).

Maka dari itu, agar identitas tidak menjadi elemen pemicu konflik, Bhabha (2012:37) mengungkapkan pentingnya keterbukaan atas budaya lain sebagai aspek penting untuk mencapai identitas hibrida. Dalam prosesnya, identitas hibrida tidak statis, melainkan dapat terus berkembang bahkan setelah masyarakat lokal yang dikuasai kolonial memerdekakan diri (Bhabha, 2012:41). Dengan kata lain, identitas hibrida erat kaitannya dengan kompleksitas dan pluralitas yang tidak dapat diidentifikasi melalui kategori-kategori yang sederhana dan statis.

Selain itu, identitas hibrida juga kerap menghasilkan individu-individu yang revolusioner (agensi) sebagai pembentuk identitas hibrida (Bhabha, 2012:77). Pemikiran Bhabha tersebut merujuk pada konsep masyarakat poskolonial Fanon, bahwa agen perubahan muncul disebabkan oleh orang-orang yang aktif dalam proses pemahaman diri. Agen perubahan tersebut tidak hanya mengalami transformasi dalam hal identitas budaya, tetapi juga secara kritis mempertanyakan dan merefleksikan posisi diri mereka dalam konteks perubahan sosial yang terjadi.

Agen perubahan ini menghadirkan pemikiran inovatif dan kemampuan untuk melampaui batasan-batasan identitas yang telah ada atau ditetapkan sebelumnya (Bhabha, 2012:77). Dengan demikian, agen perubahan tidak hanya menerima identitas dan budaya yang ada, tetapi juga menciptakan makna dan identitas baru dalam konteks revolusi.

Dalam konteks poskolonial ini pula, masyarakat yang tidak memiliki kesadaran kolektif dan negosiasi budaya dan identitas akan cenderung saling bergesekan (Bhabha, 2012:41). Keadaan yang bertendensi menciptakan konflik tersebut terbentuk karena adanya pemahaman yang saling bertentangan terkait elemen kehidupan, seperti ras, kelas, gender, budaya, dan agama (Bhabha, 2012).

Sebagai produk media dan manifestasi budaya populer yang dikonsumsi, film memiliki potensi untuk merepresentasikan kenyataan parsial. Dalam konteks ini, film bisa saja dipersepsikan sebagai kenyataan yang seolah-olah terjadi atau mewakili kebenaran atas fenomena di masyarakat sesuai dengan sudut pandang dan kepentingan pencipta. Pemahaman ini senada dengan yang diungkapkan Hall (1997:13) terkait budaya populer yang dimaknai sebagai entitas atau situs yang menyediakan pengertian dan sarana atas suatu fenomena.

Hall (1997:13) menjelaskan bahwa media massa tidak hanya menyajikan suatu informasi, tetapi juga terlibat dalam representasi fenomena dengan makna ganda, khususnya terkait aspek-aspek budaya masyarakat, seperti ras, agama, etnis, dan identitas. Dengan begitu, analisis representasi media menjadi kunci untuk mengungkap makna-makna terkait representasi tersebut. Dalam pemahaman Hall

(1997:13), representasi yang disajikan media mampu bertransformasi, memproduksi pengetahuan, dan memberikan peluang interpretasi serta dimensi makna baru.

Kemampuan media ini juga yang diungkapkan Hall (1997:13) dalam konsep *politics of signification*, yaitu suatu usaha untuk mengonstruksi pola pikir dan perilaku masyarakat sesuai dengan kepentingan politik. Maka dari itu, film *Cahaya dari Timur: Beta Maluku* penting untuk dikaji sebagai suatu situs yang kompleks untuk mengeksplorasi konflik agama dan identitas, sebagai cara film merekonstruksi konflik dalam bentuk audio visual dan narasi cerita. Melalui penelitian terhadap film *Cahaya dari Timur: Beta Maluku*, diharapkan bisa memberikan wawasan tentang dinamika budaya, ideologi, nasionalisme, dan cara masyarakat Maluku menyelesaikan masalah konflik agama dan identitas.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang bisa menjadi rujukan terkait dengan tema yang diangkat penulis. Penelitian yang dilakukan Rahman dkk (2016) menggunakan teori semiotika Pierce untuk mengungkapkan adanya toleransi umat beragama yang direpresentasikan dalam adegan dan dialog dalam film *Cahaya Dari Timur: Beta Maluku*. Sementara itu, penelitian Pattiasina (2017) menggunakan pendekatan semiotika Saussure untuk memahami budaya Maluku yang terekstraksi oleh agama, ketidakkonsistenan pewarisan budaya, dan gaya hidup baru.

Dengan pendekatan semiotika Barthes, Saputra (2017) mengungkapkan makna utama nasionalisme yang disampaikan dalam sikap rela berkorban, adanya identitas kebangsaan, dan hadirnya rasa persatuan dan kesatuan. Seperti yang dilakukan Saputra (2017), Tuankota (2018) juga menggunakan semiotik Barthes untuk mengungkapkan pesan perdamaian yang diawali dengan rekonsiliasi yang merujuk pada sikap menghargai satu sama lain.

Berbeda dengan Rahman *et al*, Pattiasina, Saputra dan Wailussy (2018) yang menggunakan pendekatan semiotik, Rachmaria (2020) menggunakan pendekatan analisis wacana kritis dalam melacak ideologi *pela-gandong* sebagai instrumen penyelesaian konflik pada film. Rachmaria (2020) menyoroti kegagalan pemerintah dalam rehabilitasi sosial dan dampak politisasi agama terhadap masyarakat pada level praksis dan sosio-kultural.

Berkaitan dengan poskolonialisme, khususnya dinamika konflik dan identitas hibrida, penulis belum menemukan karya yang membahas film *Cahaya Dari Timur: Beta Maluku*. Dalam konteks ini, tak bisa disangkal bahwa tokoh-tokoh dalam film tersebut kerap menggunakan bahasa untuk mengonstruksi identitas yang dikotomi, seperti bahasa Indonesia untuk pihak pemerintah, tentara, dan sekolah, sementara masyarakat menggunakan bahasa lokalnya.

Menurut Garane (2014), Bandia (2012), dan Karpinska (2016), bahasa tidak hanya berfungsi sebagai mediu budaya dan komunikasi, tetapi juga merepresentasikan hegemoni budaya yang dominan. Karena, menurut Garane (2014), bahasa kerap digunakan sebagai alat untuk menyebarkan dan memperkuat dominasi budaya Barat. Sebagai contoh, Bandia (2012) mengungkapkan bahwa bahasa Inggris yang dominan dapat menyebabkan pelemahan terhadap bahasa lokal.

Maka dari itu, menurut Karpinska (2016), dalam konteks poskolonialisme, bahasa dan penerjemahannya mencerminkan ketidaksetaraan antara bahasa dan budaya dominan, dengan masyarakat periferi. Dengan demikian, akan terkonstruksi pemikiran orientalis, bahkan bukan tidak mungkin bagi masyarakat merasa inferior (Karpinska, 2016). Sementara itu, Cyntara (2021) melihat bahwa film di era Orde Baru dapat mengonstruksi identitas bangsa tandingan yang lebih hibrid dan dinamis, seperti yang dikemukakan oleh Bhabha (2012), yaitu tidak seperti yang dikonstruksi oleh negara. Menurut Cyntara (2021), identitas hibrida dapat dibangun dengan kolektivitas dan relasi egaliter sehingga konflik diversitas dapat dicegah.

Dari penelitian-penelitian yang telah dijabarkan di atas, dapat diketahui bahwa baik pendekatan semiotik, analisis wacana kritis, dan analisis tekstual menghasilkan pemahaman atas adanya budaya dan praktik penyelesaian masalah masyarakat Maluku yang dinamis, khususnya konflik agama dan identitas. Selain itu, bahasa dapat mengonstruksi identitas yang dikotomi. Sedangkan pemahaman atas keberagaman dapat membentuk identitas hibrida untuk mencegah konflik identitas.

Namun demikian, belum ada penelitian yang mengkaji film *Cahaya dari Timur: Beta Maluku* dengan menggunakan pendekatan poskolonialisme. Hal inilah yang membedakan penelitian dalam artikel ini dengan yang penelitian sebelumnya. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah mengungkap

konflik agama dan identitas serta strategi agen perubahan dalam menciptakan identitas hibrida yang direpresentasikan dalam film *Cahaya dari Timur: Beta Maluku*.

METODE

Barker (2000) mengungkapkan bahwa metode penelitian dalam *cultural studies* dibagi menjadi tiga pendekatan besar, yaitu etnografis, tekstual, dan pengkajian terhadap penerimaan atau konsumsi makna oleh pembaca atau audiens. Berdasarkan pendekatan tersebut, metode yang digunakan penelitian ini termasuk dalam kategori kedua, yaitu pendekatan yang berkaitan dengan analisis teks atau wacana. Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka dan melakukan analisis satu korpus data, yakni film *Cahaya dari Timur: Beta Maluku*, dan tidak mengkaji penerimaan audiens atau penonton film tersebut secara langsung.

Film *Cahaya dari Timur: Beta Maluku* dipilih sebagai objek analisis karena relevansinya dengan tema konflik agama dan identitas dalam konteks poskolonial. Dialog dan adegan dalam film ditranskrip untuk dijadikan data utama dan dianalisis. Film *Cahaya dari Timur: Beta Maluku* diperlakukan sebagai teks yang memiliki makna.

Dalam penelitian ini, digunakan pemahaman Frantz Fanon (1963) atas konsep poskolonial untuk membantu analisis tekstual yang berfokus pada konflik agama dan identitas, serta terciptanya identitas hibrida dari Homi Bhabha (2012) yang direpresentasikan dalam dialog dan perilaku para tokoh. Selain itu, hubungan kesejarahan konflik dan relasi antartokoh, khususnya agama dan identitas, yang berkaitan dengan cerita juga dikaji untuk mengetahui dimensi poskolonial sebagai bagian dari masyarakat Maluku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada tiga pembahasan yang diuraikan pada bagian ini, yaitu: penjelasan tentang konflik agama dan identitas dalam film yang memiliki kesejarahan dan pengaruh atas Hindia Belanda di Maluku. Kemudian, pengungkapan cara dan intervensi pemerintah dalam konflik agama dan identitas serta dibahas juga perihal tindak tutur Sani Tawainella, yaitu agen perubahan, yang memiliki kesadaran dan pengaruh atas sepak bola yang dapat dijadikan sebagai instrumen identitas hibrida yang menyelesaikan konflik agama dan identitas.

• **Konflik Agama dan Identitas dalam Film *Cahaya dari Timur: Beta Maluku***

Film *Cahaya dari Timur: Beta Maluku* diawali dengan terjadinya konflik agama dan identitas, yaitu umat Islam dan Kristen di Maluku. Konflik ini menyebabkan banyak korban jiwa, termasuk anak-anak. Sani Tawainella, seorang mantan pemain sepak bola yang kini mencari nafkah sebagai tukang ojek di Tulehu, merasa miris atas kejadian tersebut. Perasaan miris ini yang menyebabkan Sani melatih anak-anak bermain sepak bola dengan tujuan mengalihkan perhatian anak-anak dari konflik agama ke sepak bola, meskipun keadaan ekonomi keluarga Sani tidak berkecukupan.

Merujuk pada Chauvel (2009), penggunaan agama sebagai alat politik di Maluku telah terjadi sejak era Hindia Belanda. Politisasi agama ini mengakibatkan marginalisasi kepada masyarakat Islam di Maluku. Pemerintah Hindia Belanda yang kerap memberikan prioritas ruang dan akses kepada masyarakat Kristen, seperti pekerjaan dan pendidikan, menyebabkan mereka mendominasi posisi penting di pemerintahan. Akan tetapi, ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, masyarakat Kristen di Maluku menunjukkan penolakan untuk bergabung dengan negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Fenomena penolakan ini mencerminkan kecemasan agama dan identitas yang masih terus berlanjut dan memuncak pada pemberontakan RMS di tahun 1949. Sebagai konsekuensinya, masyarakat Maluku mendapat stigma pemberontak yang menyebabkan pembangunan dan roda ekonomi di Maluku berhenti bergerak.

Adegan 1

Gambar 1 (A) Politisasi agama (Menit 5:53) dan
Gambar 1 (B) *Cahaya dari Timur: Beta Maluku* (Menit 11:40)



Gambar 1 (A)



Gambar 1 (B)

Pada Gambar 1 (A), terdapat spanduk yang berisikan kalimat: “HENTIKAN POLITISASI AGAMA”. Ini merepresentasikan adanya kegiatan politisasi agama seperti yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda. Dalam konteks poskolonialisme, masyarakat kelas bawah di Maluku mengalami marginalisasi oleh pemerintahnya sendiri, terutama setelah pemberontakan RMS. Pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah yang lebih menguntungkan pembangunan di daerah yang lebih padat penduduk sehingga meninggalkan Maluku dengan ekonomi yang merosot.

Pemindahan pusat perdagangan dari timur ke Pulau Jawa menciptakan ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan di Maluku. Keadaan ini mencerminkan pola pikir kolonial yang terus mempengaruhi kebijakan pemerintah dan menyebabkan kerugian pada masyarakat Maluku. Sebagai konsekuensinya, masyarakat Maluku menjadi termarginalkan dalam perkembangan ekonomi nasional. Dengan begitu, banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup, seperti keluarga Sani yang kekurangan beras, yang sebagian adegannya ditampilkan pada Gambar 1 (B).

Selain itu, dari Gambar 1 (A) dapat diidentifikasi bahwa kegiatan politisasi agama di Maluku terjadi secara terus-menerus, baik di masa pemerintah Hindia Belanda maupun di masa pemerintah Indonesia. Fenomena ini menjadi representasi atas agama tidak dipersepsikan sebagai elemen spiritual dan religiositas, melainkan instrumen manipulasi kepentingan politik yang menyebabkan adanya perilaku dan pola pikir rasial. Kemudian, dari Gambar 1 (A) dan (B) dapat diketahui juga bahwa politisasi agama dan ketidaksetaraan ekonomi saling berhubungan sehingga menciptakan realitas sosial yang kompleks.

Representasi keluarga Sani mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok mencerminkan dampak konkret dari kebijakan pemerintah yang cenderung meninggalkan Maluku dalam pengembangan ekonomi nasional. Itulah mengapa, konsep poskolonial Fanon (1963) tentang hubungan erat antara ekonomi dan konstruksi sosial rasial menjadi relevan di sini. Realitas ketidaksetaraan ekonomi di Maluku termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari yang menghasilkan ketidaksetaraan dalam akses kebutuhan dasar.

Adegan 2

Gambar 2 (C) Kelompok Kristen (Menit 5:06) dan **Gambar 2 (D)** Kelompok Islam (Menit 5: 46) dalam Film *Cahaya dari Timur: Beta Maluku*



Gambar 2 (C)



Gambar 2 (D)

Gambar 2 (C) dan Gambar 2 (D) merepresentasikan konflik agama antara kelompok Kristen dan kelompok Islam. Menurut Waileruny (2010), dalam Indrawan & Putri, (2022), kerusuhan di Maluku berawal dari konflik kecil yang terus berlanjut bahkan sampai menjadi kerusuhan sporadis yang melibatkan etnis dan berakhir menjadi konflik antara agama Islam dan Kristen sebagai identitas pembeda. Konflik ini juga berkaitan erat dengan dampak dari penggabungan Maluku dan Indonesia. Itulah mengapa, konflik antara kelompok agama Kristen dan Islam sebagai identitas dapat dipahami sebagai warisan kolonial yang telah menciptakan ketidaksetaraan relasi kuasa sehingga terjadi marginalisasi.

Dalam konteks poskolonial, konflik antaragama ini bisa diartikan sebagai upaya kelompok yang tergantikan, yaitu Kristen, untuk merebut kembali kontrol atas identitas dan aspek-aspek kehidupan mereka. Namun, upaya perebutan kembali tersebut tidak memberikan hasil yang diinginkan; malah menghasilkan pertumpahan darah dan kerusuhan. Oleh sebab itu, konflik yang terus berlanjut menjadi semakin kompleks dengan adanya ketegangan antaragama dan identitas yang memperdalam disintegrasi masyarakat.

Untuk meredam konflik, pemerintah Indonesia mengerahkan pasukan militer seperti yang direpresentasikan dalam film pada Gambar 3 (E). Pengerahan pasukan militer ini memang bisa dilakukan, tetapi Fanon (1963) juga mengungkapkan bahwa keterlibatan militer dalam menanggapi konflik antaragama dan identitas tidak selalu memberikan solusi yang menyeluruh. Meskipun, militer dapat menjadi instrumen pembangunan ideologi nasionalisme, menjaga keamanan, dan mengembalikan stabilitas secara cepat.

Akan tetapi, konflik agama dan identitas yang terjadi di Maluku berakar pada masalah sosial dan budaya yang memerlukan pendekatan holistik. Itulah sebabnya, nasionalisme bukanlah doktrin politik dan tidak bisa dipaksakan melalui kebijakan politik semata dan intervensi militer seperti yang direpresentasikan dalam film. Dalam hal ini, penting bagi pemerintah untuk melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam merumuskan makna identitas nasional mereka.

Adegan 3

Gambar 3 (E) Pengerahan militer oleh negara dalam Film *Cahaya dari Timur: Beta Maluku* (Menit 5:53)



Dalam pemahaman poskolonial, tindakan pemerintah tersebut mencerminkan penanganan konflik yang terpengaruh oleh sejarah kolonial dan kondisi poskolonial. Dalam kerangka poskolonial, peran militer seringkali dihubungkan dengan warisan kolonialisme, yakni kehadiran militer dapat menciptakan ketidaksetaraan kekuasaan dan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Lebih dari itu, penggunaan pasukan militer sebagai instrumen penyelesaian konflik dapat dipahami sebagai ekspresi dari pendekatan otoriter dalam mengelola masyarakat.

Pendekatan dengan melibatkan militer ini merepresentasikan kurangnya demokratisasi dan pengakuan terhadap aspirasi masyarakat Maluku yang merasa dimarginalkan atau tidak diwakili oleh pemerintah. Selain itu, dampak keterlibatan militer dalam penyelesaian konflik ini malah menciptakan trauma dan pembelahan kelompok di dalam masyarakat Maluku. Oleh karena itu, identitas hibrida dan negosiasi antarbudaya, seperti yang dijelaskan oleh Bhabha, semakin sulit dicapai ketika pemerintah terlalu bersikap otoriter dan kerap mengintervensi konflik di masyarakat dengan menggunakan militer.

Keadaan tidak terciptanya identitas hibrida ini dapat terlihat pada adegan di kala Kepala Sekolah SMK Passo mempertanyakan tindakan Josef Matulesy, yaitu guru olahraga SMK Passo, yang mengajak Sani untuk membantunya melatih sepak bola di SMK Passo.

Adegan 4

Gambar 4 (F) Pemahaman intoleransi agama di SMK Passo



Di dalam adegan pada Gambar 4 (F) terdapat dialog Kepala Sekolah SMK Passo, yaitu: “Yosef ose ini bagaimana? ose seperti baru mengajar saja di sini. Sani itu Muslim! Apa kata orang tua murid nanti kalau mereka tahu Sani melatih di sini?” (*Cahaya dari Timur: Beta Maluku*, Menit 01:14:13–01:16:14)

Dari percakapan antara Kepala Sekolah SMK Passo dan Josef Matulesy dapat diketahui bahwa meskipun konflik telah lama berakhir, konflik agama dan identitas tetap hadir dalam pola pikir

masyarakat. Bahkan, kecemasan atas keberadaan agama lain, yaitu Islam, di sekolah Kristen memperlihatkan masyarakat yang masih memiliki rasa trauma dari konflik agama dan identitas yang pernah terjadi. Maka dari itu, penggunaan militer oleh pemerintah tidak menyelesaikan konflik agama dan identitas di masyarakat Maluku, selain merepresentasikan pemerintah yang tidak memahami masalah utama dalam konflik agama dan identitas.

Namun demikian, dalam konsep poskolonialisme bukan berarti pihak militer tidak penting. Fanon (1963) menyoroti pentingnya nasionalisasi militer, yaitu mengintegrasikan militer ke dalam struktur sosial dan politik secara keseluruhan. Dalam hal ini, militer harus menjadi bagian dari masyarakat. Akan tetapi, merujuk pada percakapan antara Kepala Sekolah SMK Passo dan Josef Matulesy, penggunaan militer dalam menangani konflik di Maluku mencerminkan kegagalan untuk mencapai nasionalisasi yang memadai, yaitu tidak adanya sifat *kebhinekaan* dan ekspresi sila ketiga dalam Pancasila: Persatuan Indonesia.

Kegagalan pembentukan nasionalisme dalam masyarakat Maluku menunjukkan militer tidak terintegrasi pada masyarakat. Itulah mengapa, Kepala Sekolah SMK Passo mempertanyakan tindakan Josef Matulesy yang merepresentasikan ketidakharmonisan agama dan identitas. Lebih dari itu, ketidakharmonisan agama dan identitas hadir juga ketika Salim Ohorella sebagai orang Tulehu dan beragama Islam tidak menghendaki bermain sepak bola dengan orang-orang Passo yang beragama Kristen.

Adegan 5

Gambar 5. (G) Konflik identitas



Adegan pada Gambar 5, menampilkan dialog Salim Ohorella, yaitu *Aku tidak mau bermain dengan mereka (orang-orang Passo). Aku tidak akan oper bola kepada mereka ... Lagipula, kenapa tim ini harus ada orang Passo? Orang Tulehu saja sudah cukup, Kakak!* (Cahaya dari Timur: Beta Maluku, Menit 1:56:51–1:57:00)

Perkataan “*Aku tidak mau bermain dengan mereka ...*” dan “*Lagipula, kenapa tim ini harus ada orang Passo? Orang Tulehu saja sudah cukup, Kakak!*” yang diucapkan Salim Ohorella merepresentasikan diskriminasi yang merupakan hasil dari konflik agama dan identitas yang tidak sepenuhnya selesai. Fanon (1963) mengungkapkan, dampak psikologis dari kolonialisme adalah tindakan dehumanisasi, yaitu diskriminasi dan marginalisasi yang dilakukan pihak yang dominan.

Penggunaan ujaran diskriminasi ini memperlihatkan adanya konstruksi ketidaksetaraan sosial yang ditanamkan oleh pihak kolonial sehingga mempengaruhi persepsi dan interaksi antarkelompok dan individu. Lebih dari itu, ujaran “*Aku tidak mau bermain dengan mereka*” menunjukkan bagaimana kolonialisme telah menciptakan kelas sosial bukan hanya secara ekonomi dan politik, melainkan juga dalam interaksi sosial sehari-hari.

- **Sepak Bola sebagai Instrumen Pembentukan Identitas Hibrida dalam Film Cahaya dari Timur: Beta Maluku**

Permasalahan agama dan identitas sebagai konflik yang memakan banyak korban membuat Sani Tawainella dan masyarakat Maluku jengah. Meskipun tak bisa disangkal bahwa perbedaan agama dan identitas masih tetap menjadi sumber konflik yang rentan muncul di masyarakat Maluku. Ketika hati tergerak oleh keinginan untuk memberikan pengaruh positif, Sani memutuskan untuk

mengambil tindakan, yaitu Sani mengajak anak-anak di Tulehu untuk bermain sepak bola sebagai alternatif dari mengekspresikan konflik agama dan identitas.

Adegan 6

Gambar 6 (H) Kelompok Islam (Menit, 19:28) dan **Gambar 6 (I)** Sani mengajak latihan sepak bola (*Cahaya dari Timur: Beta Maluku*, Menit 19:35)



Gambar 6 (H)



Gambar 6 (I)

Pada Gambar 6 (H), dapat diketahui bahwa kelompok Islam mengajak Sani dan anak-anak untuk ikut serta dalam konflik. Akan tetapi, Sani melakukan penolakan atas ajakan tersebut dengan mengalihkan perhatian anak-anak dari konflik agama dan identitas kepada berlatih (bermain) sepak bola. Dalam hal ini, konflik agama dan identitas yang muncul di film tersebut tidak sekadar bersifat lokal, melainkan juga memiliki akar dalam sejarah kolonialisme di Maluku.

Maluku, sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam, telah menjadi objek dominasi dan kepentingan kolonial. Keadaan tersebut meninggalkan dampak jangka panjang, seperti marginalisasi agama dan identitas yang menjadi pemicu konflik, bahkan setelah Indonesia merdeka. Pemerintah Indonesia memang telah mencoba menyelesaikan konflik dengan mengerahkan militer. Akan tetapi, penyelesaian yang dilakukan pemerintah cenderung menggunakan kekerasan dalam menertibkan kerusuhan. Itulah mengapa, konflik agama dan identitas di Maluku tetap terjadi.

Di sisi lain, Sani menggunakan pendekatan yang berbeda, yaitu mengajak anak-anak bermain sepak bola. Dengan mengajak anak-anak bermain sepak bola, Sani mencoba menghilangkan persepsi konflik agama dan identitas dalam pikiran dan pengalaman anak-anak. Kesukaan anak-anak terhadap kegiatan sepak bola menjadi kunci keberhasilan upaya Sani. Anak-anak merasa senang dan antusias dapat dilatih oleh Sani yang dengan penuh semangat berbagi pengetahuan sepak bola yang dimilikinya. Oleh sebab itu, dengan olahraga sepak bola, anak-anak dapat mengekspresikan diri tanpa harus terikat pada label agama dan identitas yang rentan memicu konflik.

Adegan 7

Gambar 7 (J) Josef Matulesy menjelaskan dampak Sani Tawainella



Pada Gambar 7, terdapat upaya dimana Josef Matulesy menjelaskan dampak Sani Tawainella dengan dialog: *Begini, coba Bapa bayangkan apa kata orangtua murid nanti kalau mereka tahu sekolah kita menjadi juara di "John Mailoa Cup" dan menjadi sekolah yang mencontohkan rekonsiliasi karena berlatih seorang Muslim. Bapa, Sani Tawainella ni dia pernah ikut Pelatnas Junior dan bersekolah di sekolah olahraga di Ragunan. Dia bukan juga jago secara teknis saja Bapa, dia juga jago memotivasi anak-anak. Itu yang katong butuhkan sekarang. (Cahaya dari Timur: Beta Maluku, Menit 01:14:13–01:16:14).*

Ungkapan "kalau mereka tahu sekolah kita menjadi juara di John Mailoa Cup dan menjadi sekolah yang mencontohkan rekonsiliasi karena berlatih seorang Muslim" menjelaskan adanya dampak positif dari Sani apabila dirinya melatih sepak bola di SMK Passo yang merupakan sekolah Kristen. Ungkapan tersebut juga muncul karena Josef Matulesy menyadari bahwa Sani dapat merangkul perbedaan agama dan identitas. Oleh sebab itu, kehadiran Sani di SMK Passo dapat dipahami sebagai langkah konkret menuju identitas hibrida. Sebagai dampaknya, masyarakat juga dapat melihat bahwa pendidikan di SMK Passo tidak hanya mengutamakan keunggulan olahraga, tetapi juga memberikan contoh konkret atas toleransi beragama dan perbedaan identitas.

Contoh lain munculnya identitas hibrida di masyarakat adalah ketika Sani melatih tim sepak bola KU-15 Maluku untuk mengikuti Kejuaraan Nasional 2006, di Jakarta. Masalah muncul ketika Sani dan tim sepak bola Maluku hendak berangkat, yaitu dana yang diberikan oleh dinas dan pemerintah setempat tidaklah cukup. Untuk mengatasinya, para warga kemudian saling membantu dengan menyumbang uang untuk keperluan tim sepak bola KU-15 Maluku.

Adegan 8

Gambar 8 (K) Pendeta memberikan uang kolekte dan **Gambar 8 (L)** Masyarakat Tulehu memberikan sumbangan (*Cahaya dari Timur: Beta Maluku, Menit 01:14:13–01:16:14*)



Gambar 8 (K) dan Gambar 8 (L) merepresentasikan masyarakat Maluku yang menciptakan identitas hibrida melalui tindakan kolektif untuk menyelesaikan masalah dana. Kesadaran masyarakat Maluku untuk mengumpulkan dana ini mencerminkan identitas hibrida yang melampaui batasan agama Islam-Kristen dan identitas Tulehu-Passo. Adapun solidaritas masyarakat Maluku tersebut dipantik oleh Sani sebagai agen perubahan yang merangsang partisipasi masyarakat untuk menciptakan identitas hibrida. Representasi Sani sebagai agen perubahan dapat diketahui juga pada kutipan berikut.

Sani Tawainella	: Karena aku Maluku. Bukan Tulehu. Bukan Passo. Bukan Kristen. Bukan Islam. Jago, kau siapa?
Hari Zamhari Lestahu:	Aku Maluku.
Sani Tawainella	: Salem, kau siapa?
Salim Ohorella	: Aku Maluku, Kakak.
Sani Tawainella	: Pellu, Kasim, Akbar! Kalian Siapa?
Risky Pellu, Kasim	: Aku Maluku, Kakak!
Akbar Marasabessy	: Aku Maluku, Kakak!
Sani Tawainella	: Finky, Fanky, kalian siapa?
Sani Tawainella	: Kalau aku tanya kalian siapa, kalian menjawab apa?
Semua orang	: Kami maluku!

(Cahaya dari Timur: Beta Maluku, Menit 2:02:25–2:07:33)

Ungkapan “*Karena aku Maluku. Bukan Tulehu. Bukan Passo. Bukan Kristen*” merepresentasikan penolakan Sani terhadap pemahaman tradisional atas agama dan identitas. Dengan menciptakan narasi identitas hibrida yang mampu memfasilitasi keberagaman, Sani mengajak tim sepak bola KU-15 Maluku untuk bersama-sama mengidentifikasi diri sebagai “*aku Maluku*”. Oleh karena itu, identitas hibrida yang diciptakan oleh Sani dengan menggunakan sepak bola sebagai instrumennya tidak menghapus perbedaan, tetapi justru mengakui keberagaman agama dan identitas sebagai bagian dari masyarakat Maluku.

SIMPULAN

Penggunaan agama sebagai alat politik di Maluku telah terjadi sejak era Hindia Belanda hingga Indonesia merdeka. Fenomena ini memperlihatkan bahwa agama tidak dipersepsikan sebagai elemen spiritual dan religiositas, tetapi sebagai instrumen manipulasi kepentingan politik yang menyebabkan adanya perilaku dan pola pikir rasial. Lebih dari itu, konflik antara agama Islam dan Kristen sebagai identitas pembeda berkaitan erat dengan dampak dari penggabungan Maluku dan Indonesia. Itulah mengapa, konflik antara kelompok agama Kristen dan Islam sebagai identitas dapat dipahami sebagai warisan kolonial yang telah menciptakan ketidaksetaraan relasi kuasa sehingga terjadi marginalisasi.

Untuk menyelesaikan konflik, pemerintah Indonesia mengerahkan pasukan militer dengan hasil keadaan menjadi stabil dan aman secara cepat. Namun, konflik agama dan identitas yang terjadi di Maluku berakar pada masalah sosial dan budaya yang memerlukan pendekatan holistik sehingga tidak bisa diselesaikan dengan penanaman nasionalisme melalui kebijakan politik dan intervensi militer. Maka dari itu, penting bagi pemerintah untuk melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam merumuskan makna identitas nasional mereka.

Penyelesaian konflik dengan melibatkan militer ini merepresentasikan kurangnya demokratisasi dan pengakuan terhadap aspirasi masyarakat Maluku yang merasa dimarginalkan atau tidak diwakili oleh pemerintah. Oleh karena itu, identitas hibrida dan negosiasi antarbudaya semakin sulit dicapai ketika pemerintah bersikap otoriter dan kerap mengintervensi konflik di masyarakat dengan menggunakan militer. Keadaan tidak terciptanya identitas hibrida ini dapat terlihat pada adegan Kepala Sekolah SMK Passo mempertanyakan tindakan Josef Matulesy yang mengajak Sani untuk membantunya melatih sepak bola di SMK Passo. Lebih dari itu, ketidakharmonisan agama dan identitas direpresentasikan juga ketika Salim Ohorella sebagai orang Tulehu dan beragama Islam tidak menghendaki bermain sepak bola dengan orang-orang Passo yang beragama Kristen.

Berbeda dengan pemerintah, Sani mencoba menghilangkan persepsi konflik agama dan identitas dalam pikiran dan pengalaman anak-anak dengan bermain sepak bola. Dengan sepak bola, anak-anak dapat mengekspresikan diri tanpa harus terikat pada label agama dan identitas yang rentan memicu konflik. Selain itu, kehadiran Sani di SMK Passo untuk melatih sepak bola dapat dipahami sebagai langkah konkret menuju identitas hibrida.

Contoh lain munculnya identitas hibrida adalah ketika masyarakat Maluku sadar atas solidaritas sehingga mereka mau mengumpulkan dana untuk keberangkatan tim sepak bola KU-15 Maluku. Kemauan masyarakat tersebut mencerminkan identitas hibrida yang melampaui batasan agama Islam-Kristen dan identitas Tulehu-Passo. Meskipun, solidaritas masyarakat Maluku tersebut dipantik oleh Sani sebagai agen perubahan yang merangsang partisipasi masyarakat untuk menciptakan identitas hibrida. Dengan demikian, identitas hibrida yang Sani ciptakan dengan menggunakan sepak bola sebagai instrumennya bukanlah upaya menghapus perbedaan, melainkan ekspresi penerimaan atas adanya keberagaman agama dan identitas yang memperkuat dan memperkaya masyarakat Maluku.

DAFTAR PUSTAKA

- Barker, C. (2000). *Cultural Studies, Theory and Practice*. London: Sage Publications.
- Bandia, P. (2012). "Postcolonial literary heteroglossia: a challenge for homogenizing translation" dalam *Perspectives*, 20(4), 419–431. <https://doi.org/10.1080/0907676X.2012.726233>
- Bertrand J. (2009). *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*. Cambridge Asia-Pacific Studies. Cambridge: Cambridge University Press; 2003:114-134. doi:10.1017/CBO9780511559341.009
- Bhabha, H. K. (2012). *The location of culture*. London: Routledge.
- Chauvel, R. (2008). *Nationalists, soldiers and separatists*. <https://doi.org/10.1163/9789004253957>
- Cyntara, Rheisnayu. (2021). *Mengimajinasikan Bangsa dalam Sinema, Diskursus Performative Nation dalam Film Dongeng dari Dirah (1992) dan Under the Tree (2008)*. Tesis. Universitas Gadjah Mada.
- Fanón, F. (1963). *The wretched of the Earth*. <http://dx.doi.org/10.2307/20048263>
- Garane, J. (2014). "How Postcolonial Translation Theory Transforms Francophone African Studies" dalam *The Comparatist* 38, 188-205. doi:10.1353/com.2014.0022.
- Hall, S. (1997). *Representation: Cultural representations and signifying practices*. SAGE Publications eBooks. <http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA29844802>
- Indrawan, J., & Putri, A.T. (2022). "ANALISIS KONFLIK AMBON MENGGUNAKAN PENAHAPAN KONFLIK SIMON FISHER" dalam *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*.
- Karpińska, P. (2016). "POSTCOLONIAL TENDENCIES IN TRANSLATION IN THE LIGHT OF CENTRE-PERIPHERY PRE-CONCEPTUAL IMAGE SCHEMA" dalam *Journal of Education Culture and Society*, 7(2), 328-339. <https://jecs.pl/index.php/jecs/article/view/10.15503.jecs20162.328.339>
- Pattiasina, T. P. S. (2018). "Representasi Budaya Maluku dalam Film Cahaya dari Timur: Beta Maluku" dalam jurnal *E-Komunikasi*, [Nol 6, no 1].
- Qurtuby, S. A. (2018). "Sejarah Politik Politisasi Agama dan Dampaknya di Indonesia" dalam jurnal *Maarif*, 13(2), 43–54. <https://doi.org/10.47651/mrf.v13i2.21>
- Rachmaria, L. (2020). "Melacak keberadaan ideologi pada film Cahaya dari Timur: Beta Maluku" dalam jurnal *ProTVF: Jurnal Kajian Televisi Dan Film*, 4(2), 270. <https://doi.org/10.24198/ptvf.v4i2.26283>
- Rahman, R. H., Soedarsono, D. K., & Atnan, N. (2016). "Representasi toleransi umat beragama dalam film Cahaya dari Timur (Analisis semiotika Charles Sanders Pierce dalam film Cahaya dari Timur)" dalam jurnal *eProceedings of Management*, 3(2). <https://librarye proceeding.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/2269/2145>
- Saputra, Tri. (2017). *Analisis Semiotika Makna nasionalisme dalam film Cahaya dari Timur: Beta Maluku karya Angga Dwimas Sasongko*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40201/1/TRI%20SAPUTRA%20S-M-FDK.pdf>
- Tuankotta, U. (2019). *MAKNA PESAN PERDAMAIAN DALAM FILM DRAMA INDONESIA (Analisis Semiotika dalam Film Cahaya dari Timur : Beta Maluku, Karya Angga Dwimas Sasongko)*. <https://eprints.umm.ac.id/45598/>
- Wailussy, Farhan. (2018). *Perdamaian dalam Film: Analisis Semiotika Pesan Perdamaian dalam Film 'Cahaya dari Timur Beta Maluku'*. Tesis. Universitas Gadjah Mada.
- Wynter, S. (2001). "Towards the Sociogenic Principle: Fanon, Identity, the Puzzle of Conscious Experience, and What It Is Like to Be 'Black'" dalam *National Identities and Socio-Political Changes in Latin America*. Routledge.

SUMBER DATA

- Sasongko, A. D. (Sutradara). (2014). *Cahaya dari Timur: Beta Maluku*.